

Neo Nasionalisme di Era Digital

Oleh Gatut Priyowidodo, Ph.D

RUANG publik kita hari-hari ini, semakin sesak dengan beragam penegasan identitas komunal yang sektarian. Bahkan dapat dikatakan hampir tak ada sejengkal lahan, yang tidak diserbu kemeriahan asesoris simbolik atas nama agama dan gerakan intoleransi. Mereka seolah menyerang dari segala penjuru mata angin, Perbedaan bukan lagi dimaknai sebagai pilar kekuatan membangun kebersamaan sebuah bangsa, tetapi telah direduksi sebagai anasir yang memperkuat fragmentasi sosial. Celaknya, negara yang telah 'dibaptis' oleh spirit reformasi justru melakukan pembiaran. Aksi sporadis penganiayaan individu pemuka agama dan perusakan rumah-rumah ibadah sengaja diabaikan tanpa upaya solusi yang mengedepankan rasa keadilan. Pertanyaan kuncinya adalah akankah situasi seperti ini semakin terus bergelayutan ataukah pada titik tertentu malah terjadi 'rebounding' (aksi kembali balik).

Mengelola Perbedaan

Mengutip data yang dipublikasikan *Human Right Watch* 2013, ternyata kekerasan terhadap kehidupan beragama pada tiga tahun terakhir tidak kunjung semakin menurun tetapi justru semakin meningkat. Tahun 2010 terdapat 216 kasus, tahun 2011 menjadi 244 kasus. Sementara sembilan bulan pertama tahun 2012 sudah mencapai angka 214 kasus. Laporan tersebut juga mengungkapkan bagaimana militan Sunni menyerang desa Syiah di Sampang, Madura pada 29 Desember 2011 hingga pembungkaman yang dilakukan pengadilan terhadap Alexander, seorang administrator Facebook Group *Minang Atheist* dengan hukuman 30 bulan penjara dan denda 100 juta rupiah. (<http://www.hrw.org/world-report/2013>). Kutipan data tersebut hendak mengatakan bahwa inilah realitas kondisi kebebasan beragama di Indonesia yang perlu dibenahi.

Pekerjaan pembenahan bukanlah pekerjaan yang mudah dilakukan. Memang kalau sekedar mengatakan itu tidak sulit. Tetapi bila dibawa ke ranah praktis akan muncul beragam tentangan yang luar biasa dasyatnya. Kasus GKI Yasmin di Bogor dan HKBP Filadelfia di Bekasi contohnya. Meskipun Mahkamah Agung sudah mengeluarkan amar putusan final, ternyata eksekusi di lapangan tidak mudah. Pemerintahan lokal hingga Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Menteri Agama Suryadarma Ali tidak terdorong untuk selekasnya menyelesaikan masalah ini, malah terkesan memberi pembatasan atas nama ketertiban publik.

Bahkan M Jusuf Kalla, dalam kapasitasnya selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia menyerukan agar umat Kristen tidak perlu membesar-besarkan. Ia mengatakan dalam forum konferensi gereja di Makassar tanggal 1 Maret 2013: "Anda ini sudah punya 56.000 gereja seluruh Indonesia tidak ada masalah, seharusnya berterima kasih, pertumbuhan jumlah gereja lebih besar daripada masjid, kenapa urusan satu gereja ini anda sampai bicara ke seluruh dunia?" (<http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/03/03>).

Sepintas logika pak Kalla yang sekarang menjadi Wakil Presiden terpilih tersebut masuk akal. Namun yang lupa dicermati adalah logika kepastian hukum, ketaatan warga bangsa kepada

Konstitusi dan era digital media. Negara menjamin kehidupan beragama seluruh rakyatnya tanpa diskriminasi. Ini amanat Konstitusi. Pada saat yang sama, ketika negara tidak melaksanakan itu, *'watch dog'* yang dimainkan media langsung bekerja. Tidak usah dikomando, media online menggetarkan isu itu, isu sensitive tersebut melesat menjadi bahan diskusi publik lintas kawasan. Di gengaman tangan para netizen lewat jejaring media sosial, isu lokal berubah menjadi isu global. Apalagi berdasarkan data yang dirilis *Survei Data Global Web Index*, Indonesia adalah negara yang memiliki pengguna media sosial yang paling aktif di Asia. Indonesia memiliki 79,7% user aktif di media sosial mengalahkan Filipina 78%, Malaysia 72%, bahkan Cina 67%. Sementara statistik perkembangan internet di Indonesia mencapai 15% atau 38,191,873 pengguna internet dari total populasi kita 251,160,124, Sedang pengguna internet dengan menggunakan mobile/smartphone mencapai 14% dari populasi (Ahmad, 2014).

Artinya, ketika kita hidup di era digital media, apapun perilaku negara kepada warganya, tidak boleh semena-mena. Kontrol media baik yang berskala domestik ataupun internasional akan terus berlangsung. Bila pemimpin, tidak juga paham perubahan episentrum kekuatan pengontrol seperti ini, dapat dipastikan negara akan sangat kewalahan merespon segala hardikan yang datang silih berganti.

Satu hal lagi jangan pula dilupakan, negeri ini bukan negeri hibah atau hadiah. Tetapi hasil perjuangan para martir yang multi etnik, multi ras dan multi penganut agama. Tidak boleh ada yang mengklaim satu pihak lebih berkontribusi dan yang lainnya hanya sekedar penumpang gelap. Kebebasan harus dinikmati bersama tanpa intimidasi dan tafsir dominasi. Pelangi itu tampak indah karena ia berkelir warna-warni.

Neo Nasionalisme

Perjalanan membentuk bangsa yang sudah tujuh dekade ini, mestinya sudah final. Kita tidak selalu sibuk dengan pengulangan topik merajut pluralitas kebangsaan. Cetak biru bangsa yang sosialis-religius adalah tema utama. Jangan sampai energi bangsa ini terus terkuras dan kita habis masa serta hanya jalan di tempat. Apa yang sudah disepakati, lanjutkan. Namun fakta, selalu bicara lain. Kalau kondisi ini terus menerus kita wariskan dari generasi ke generasi, dapat dipastikan kita tak lebih dari lahapen empuk serigala liar yang menguap kelaparan. Kita akan menjadi korban tanpa daya.

Seandainya para pemimpin atau elit negeri ini mendengar saran kultural rasul Paulus bahwa aku melupakan apa yang dibelakangku dan mengarahkan apa yang ada dihadapanku, mungkin negeri ini sudah sampai pada kulminasi kejayaan. Sayang nasehat indah itu tak pernah sampai di telinga mereka.

Fakta itu sekaligus mengisyaratkan dua hal, tantangan dan peluang. Sebagai tantangan, umat Kristiani harus memiliki komitmen dan integritas tinggi di tengah keterpurukan dan karut marutnya keadaan yang ada. Medan di depan mata bukan lagi palagan adu kekuatan, tetapi bagaimana berebut partisipasi mengisi kemerdekaan. Itulah yang saya istilahkan merekonstruksi spirit nasionalisme baru atau neo nasionalisme. Sepatutnyalah kita belajar dari sosok Dr Johanes Leimena (1905-1977), seorang intelektual, politisi dan tokoh Kristiani era kemerdekaan. Dia tidak hanya pernah menjabat sebagai menteri kesehatan dan menteri

sosial, Leimena pun lima kali menjadi wakil perdana menteri. Secara keseluruhan ia 18 kali menjadi menteri dalam rentang waktu 20 tahun. Lagi pula Leimena pernah sampai tujuh kali memegang fungsi Pejabat Presiden RI. Apa yang membuat Leimena dipercaya baik oleh kalangan Nasionalis, Islam, dan Komunis? Berbagai sumber menyebut karakter Leimena yang menonjol, yaitu sederhana, jujur, dan tenang. Bukankah watak seperti itu tidak sulit kita teladani? Hanya persoalannya seberapa banyak di antara kita mau menjalani hidup asketis di tengah kian gemerlapnya godaan gaya hidup hedonis.

Kedua adalah memanfaatkan peluang yang ada. Peluang emas tidak pernah datang dua kali. Maka seyogyanya prinsip hidup cerdas seperti ular dan tulus seperti merpati menjadi penyemangat untuk tidak mudah patah arang menghadapi belukar kehidupan. Selalu ada satu sisi terbuka, ketika semua sisi kelihatan tertutup.

***Gatut Priowidodo, Ph.D Ketua PKKP (Pusat Kajian Komunikasi Petra) dan Dosen Prodi Ilmu Komunikasi UK Petra Surabaya**